

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah bagian barat seperti Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Barat, masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Meskipun wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong rendah dan laju pertumbuhan ekonominya cenderung berada di bawah rata-rata nasional (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang belum tergarap optimal dan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di setiap daerah. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor utama seperti investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja menjadi relevan untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Indonesia bagian barat dalam penelitian ini mencakup provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan yang secara geografis dan ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kawasan ini terdiri dari 18 provinsi dengan karakteristik struktur ekonomi yang beragam, mulai dari provinsi berbasis industri dan jasa modern seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, hingga provinsi yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat.

Meskipun berada dalam satu kawasan geografis yang sama dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, dinamika pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Indonesia bagian barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat investasi, kualitas dan jumlah tenaga kerja, serta kapasitas pengeluaran pemerintah daerah menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi perbedaan laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, analisis yang lebih spesifik pada kawasan Indonesia bagian barat menjadi penting untuk memahami determinan pertumbuhan ekonomi secara regional.

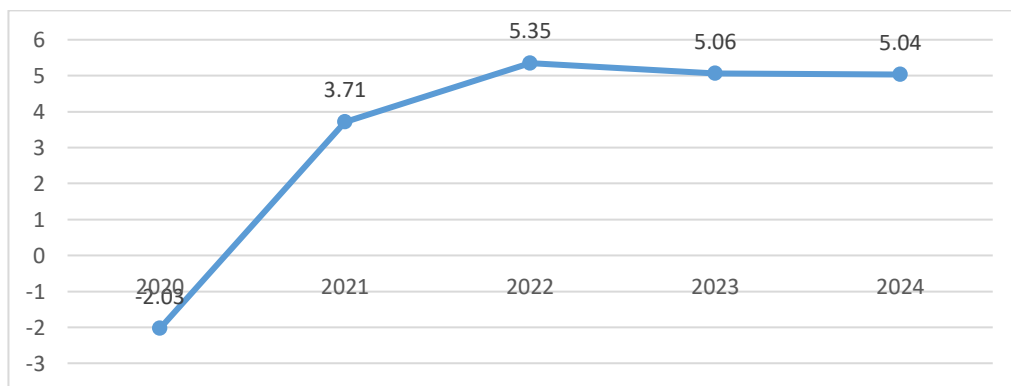
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan kontribusi wilayah administrasi di bawahnya. Kedua pendekatan tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Selain sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga berfungsi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. (Lestari *et al.*, 2021).

Dalam teori pembangunan ekonomi, dikenal adanya trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Jika pembangunan difokuskan pada pertumbuhan, maka capaian ekonomi cenderung tinggi namun distribusi pendapatan bisa menjadi timpang. Sebaliknya, jika penekanan diberikan pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi bisa melambat meskipun distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Negara-negara maju telah menerapkan strategi Redistribution with Growth, yaitu

pembangunan yang mengedepankan pemerataan melalui proyek-proyek yang padat karya dan inklusif (Lestari *et al.*, 2021).

Salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara konseptual, PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah berdasarkan harga aktual tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah berdasarkan harga tetap pada tahun dasar tertentu, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan pertumbuhan riil (Fatimah & Handayani, 2021).

Dari sisi kemanfaatannya, PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, PDRB ADHK menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja ekonomi dan efektivitas pembangunan daerah (Fatimah & Handayani, 2021).



Sumber : BPS (Data Diolah, 2025)

Grafik 1.1
Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Garafik 1.1 pertumbuhan ekonomi tahun 2020–2024 memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi berada pada level -2,03%, mencerminkan kontraksi yang tajam akibat pandemi COVID-19. Pada periode ini, pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan global menekan hampir seluruh sektor perekonomian. Baldwin dan di Mauro (2020) menegaskan bahwa pandemi menimbulkan double shock penurunan permintaan dan gangguan pasokan yang memerlukan respons kebijakan fiskal dan moneter yang agresif. Temuan ini selaras dengan Wibisono dan Haryanto (2021) yang mengungkapkan bahwa di Indonesia, penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi kontributor utama kontraksi PDB.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan berbalik positif menjadi 3,71%, yang sebagian besar didorong oleh efek base effect, pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, percepatan vaksinasi, dan kebijakan fiskal ekspansif. Jordà et al. (2022) menemukan bahwa negara yang melakukan stimulus fiskal pasca-pandemi cenderung mengalami pemulihan lebih cepat, sejalan dengan Prasetyo dan Hadi (2022) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah di Indonesia berperan signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi di tingkat provinsi.

Fenomena yang terlihat adalah meskipun pertumbuhan secara agregat menunjukkan perbaikan pasca-pandemi, manfaatnya belum merata antarwilayah. Nugroho dan Pambudi (2023) menunjukkan bahwa provinsi dengan basis ekonomi sektor primer, khususnya pertanian, memiliki laju pertumbuhan lebih lambat dibanding provinsi berbasis industri dan jasa. Temuan ini konsisten dengan

UNESCAP (2022) yang menyatakan bahwa ketidakmerataan struktur ekonomi antarwilayah menjadi salah satu hambatan pemulihan inklusif di Asia-Pasifik.

Gap penelitian yang muncul adalah bahwa meskipun telah banyak kajian nasional dan internasional yang membahas pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada tingkat nasional atau agregasi regional secara umum, sehingga belum mampu menangkap heterogenitas karakteristik ekonomi antarprovinsi, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Barat yang memiliki struktur ekonomi dan tingkat pembangunan yang beragam. Selain itu, studi empiris pasca-pandemi masih didominasi oleh pendekatan cross section atau time series, sementara pemanfaatan regresi data panel pada tingkat provinsi dengan periode observasi terbaru (2020–2024) masih relatif terbatas.

Di sisi metodologis, beberapa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan ekonometrika lanjutan seperti Two Stage Least Squares (2SLS) untuk mengatasi permasalahan endogenitas, namun belum secara spesifik mengombinasikannya dengan karakteristik data panel antarprovinsi dalam konteks pasca-pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis empiris berbasis regresi data panel pada tingkat provinsi di wilayah Indonesia Bagian Barat selama periode 2020–2024, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarwilayah.

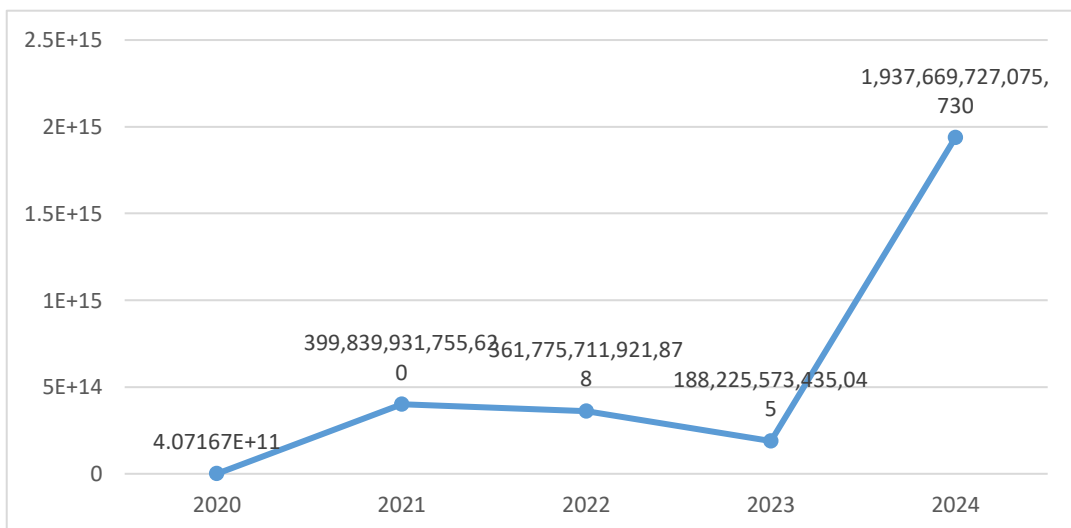
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi pada periode 2020–2024 tersebut memberikan indikasi bahwa peran faktor-faktor fundamental

pembangunan, salah satunya pengeluaran pemerintah, menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan. Sebagai instrumen fiskal utama, pengeluaran pemerintah tidak hanya berfungsi untuk merangsang permintaan agregat pada saat krisis, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membiayai infrastruktur, layanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi daerah. Dalam konteks pasca-pandemi, belanja pemerintah di wilayah Indonesia bagian barat berpotensi memiliki pengaruh yang berbeda-beda antarprovinsi, bergantung pada kapasitas fiskal dan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga penting dianalisis secara empiris untuk melihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi wilayah. Namun sering terjadi masalah dalam akurasi proyeksi pendapatan, sehingga realisasi PAD belum maksimal (Saraswati, 2018). Melalui UU No. 1/2022, diharapkan kemampuan daerah dalam memperoleh dana meningkat. PAD sebagai modal lokal secara akumulatif diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi (Zulvan & Purbasari, 2024)

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Musgrave menyatakan pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Todaro dan Smith (2020) juga menegaskan bahwa belanja pemerintah, terutama belanja modal dan pembangunan, berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah dengan sektor swasta yang lemah.

Teori Keynesian menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah termasuk dalam komponen pengeluaran agregat yang dapat langsung mendorong permintaan efektif dan output ekonomi. Paul Samuelson menyatakan bahwa peran pemerintah meliputi pembentukan kerangka hukum, stabilisasi makroekonomi, alokasi sumber daya, dan redistribusi pendapatan. Sementara Adam Smith menyebut bahwa pemerintah hanya menjalankan peran-peran yang tidak dilakukan swasta, yaitu menjaga keamanan, menyediakan sistem hukum, dan menyediakan barang public (Yunus & Anwar, 2021).



Sumber: BPS (Data Diolah, 2024)

Grafik 1.2

Pengeluaran Pemerintah Tahun 2020-2024

Grafik 1.2 grafik pengeluaran pemerintah tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi dengan lonjakan sangat besar pada tahun terakhir. Pada 2020, pengeluaran pemerintah tercatat sekitar Rp 407 triliun, relatif rendah karena sebagian besar belanja dialihkan untuk penanganan darurat COVID-19 serta program jaring pengaman sosial. Tahun 2021 meningkat signifikan

menjadi sekitar Rp 399 triliun, mencerminkan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diarahkan pada bantuan sosial, subsidi usaha kecil, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, pada 2022 pengeluaran pemerintah sedikit menurun menjadi Rp361 triliun dan kembali turun di 2023 menjadi Rp188 triliun, yang menggambarkan fase konsolidasi fiskal seiring menurunnya kebutuhan belanja darurat pandemi serta upaya pemerintah menekan defisit anggaran. Fenomena mencolok muncul pada 2024, ketika pengeluaran pemerintah melonjak drastis hingga Rp 1.937 triliun. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya belanja infrastruktur strategis, kebutuhan fiskal menjelang pemilu, serta kenaikan transfer ke daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.

Dari sisi teori, Keynes (dalam Mankiw, 2021) menekankan bahwa pengeluaran pemerintah berperan besar sebagai instrumen fiskal untuk mendorong permintaan agregat, khususnya pada saat krisis. Hal ini juga tampak pada konteks pasca-pandemi di mana stimulus fiskal terbukti mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Secara internasional, Jordà et al. (2022) menemukan bahwa negara-negara dengan belanja publik tinggi pasca-pandemi mencatat pemulihan PDB yang lebih cepat. Penelitian UNESCAP (2022) juga menegaskan pentingnya belanja pemerintah di Asia-Pasifik dalam menjaga stabilitas pertumbuhan jangka menengah. Sementara di Indonesia, Prasetyo dan Hadi (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terbukti mendorong pemulihan ekonomi provinsi-provinsi yang terdampak pandemi, meskipun Nugroho dan Pambudi (2023) menekankan

adanya ketimpangan distribusi belanja antarwilayah, di mana daerah dengan kapasitas fiskal besar lebih cepat pulih dibanding daerah bergantung transfer pusat.

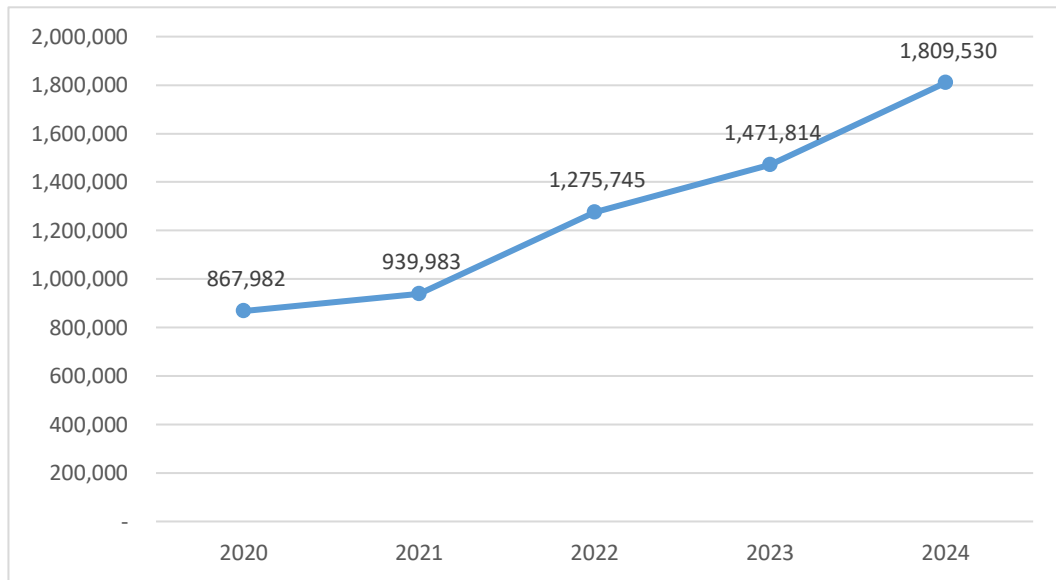
Fenomena yang terekam dalam grafik adalah adanya pola naik–turun pengeluaran pemerintah: meningkat di 2021, menurun 2022–2023, lalu melonjak ekstrem pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak hanya dipengaruhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga faktor politik (misalnya agenda pemilu), dinamika global (harga komoditas, stabilitas fiskal), serta prioritas kebijakan nasional. Pola yang tidak konsisten ini dapat menciptakan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan efisiensi belanja publik.

Gap penelitian terlihat pada keterbatasan kajian empiris yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada tingkat provinsi dengan pendekatan data panel dalam konteks pasca-pandemi. Sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada pengeluaran pemerintah secara agregat nasional atau terbatas pada periode penanganan pandemi, sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan kebijakan fiskal dari fase krisis menuju pemulihan dan ekspansi fiskal di tingkat provinsi. Penelitian yang secara spesifik mengkaji pengeluaran pemerintah provinsi di wilayah Indonesia Bagian Barat selama periode 2020–2024 masih relatif terbatas, padahal wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi dan struktur belanja daerah yang beragam.

Selain itu, kajian empiris yang membandingkan variasi dampak pengeluaran pemerintah antarprovinsi juga belum banyak dilakukan, sehingga perbedaan efektivitas belanja pemerintah akibat heterogenitas struktur ekonomi daerah belum

tergambarkan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam memahami bagaimana pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berbeda-beda pada masa pasca-pandemi.

Di sisi lain, meskipun investasi telah banyak dikaji sebagai determinan pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori pertumbuhan klasik dan model Harrod–Domar, sebagian besar penelitian masih menganalisisnya secara terpisah atau pada level nasional. Kajian yang mengintegrasikan peran investasi bersama pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja dalam satu kerangka analisis data panel tingkat provinsi, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Barat pada periode 2020–2024, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis empiris berbasis data panel yang mampu menangkap perbedaan karakteristik antarprovinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Dalam konteks Indonesia, investasi terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjadi indikator kemampuan daerah menarik arus modal pembangunan. PMDN mencerminkan kepercayaan investor domestik terhadap iklim usaha daerah, sedangkan PMA menunjukkan daya tarik daerah di tingkat global. Peran strategis investasi ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Rosmayanti & Apriani, 2023).



Sumber: BPS (Data Diolah, 2024)

Grafik 1.3

Investasi PMDN dan PMA 2020-2024

Berdasarkan grafik 1.3 Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), pada grafik yang ditampilkan dalam satuan miliar rupiah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp867.982 miliar, meningkat menjadi Rp939.983 miliar pada 2021, lalu melonjak tajam ke Rp1.275.745 miliar pada 2022, terus naik ke Rp1.471.814 miliar pada 2023, hingga mencapai puncak Rp1.809.530 miliar pada 2024. Peningkatan investasi ini konsisten dengan pandangan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menekankan pentingnya akumulasi modal sebagai motor utama pertumbuhan, di mana semakin besar modal yang ditanamkan maka semakin tinggi pula kapasitas produksi suatu wilayah. Adam Smith dan David Ricardo menyatakan bahwa tabungan dan investasi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas

lapangan kerja, sehingga tren investasi yang meningkat mencerminkan fondasi pertumbuhan yang kuat.

Jika dikaitkan dengan teori Harrod–Domar, lonjakan investasi ini juga memperlihatkan bagaimana tambahan modal mampu mendorong percepatan pertumbuhan output. Harrod–Domar menekankan pada hubungan langsung antara tingkat investasi dengan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan investasi akan memperbesar stok modal sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi agregat. Hal ini terlihat jelas pada periode 2022–2024, ketika kenaikan investasi dari Rp939.983 miliar ke Rp1.809.530 miliar berbanding lurus dengan peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian barat. Penelitian terdahulu oleh Wibowo dan Susanti (2021) juga menemukan bahwa investasi, terutama dari sektor PMA, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional karena membawa transfer teknologi, keterampilan, dan jaringan pasar internasional.

Dari perspektif teori pertumbuhan neoklasik (Solow, 1956), peningkatan investasi yang berkelanjutan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan cenderung menuju titik steady state ketika tambahan modal tidak lagi memberikan kenaikan output yang signifikan tanpa adanya kemajuan teknologi. Namun demikian, investasi PMA yang masuk biasanya tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga inovasi teknologi dan praktik manajerial yang modern, sehingga dapat menggeser kurva pertumbuhan ke arah yang lebih tinggi. Penelitian oleh Santosa (2022) dan Dewi (2023) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa investasi asing berperan

dalam mempercepat adopsi teknologi serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di daerah tujuan.

Fenomena yang muncul dari tren data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 pada 2020–2021, arus investasi tetap meningkat secara bertahap. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia bagian barat yang memiliki potensi sumber daya alam, pasar domestik yang besar, dan dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi kondusif. Namun, gap penelitian yang masih relevan adalah bagaimana distribusi investasi ini belum merata antarprovinsi serta belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Lestari (2020) menegaskan bahwa efek trickle down dari investasi asing masih terbatas jika tidak disertai kebijakan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, penting untuk melihat investasi bukan hanya dari sisi besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari efektivitas pemanfaatannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain aspek fiskal dan investasi, tenaga kerja juga merupakan komponen fundamental dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai pelaku utama pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan utama, yaitu peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar, peningkatan standar hidup melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, serta pendidikan, dan perluasan kesempatan ekonomi

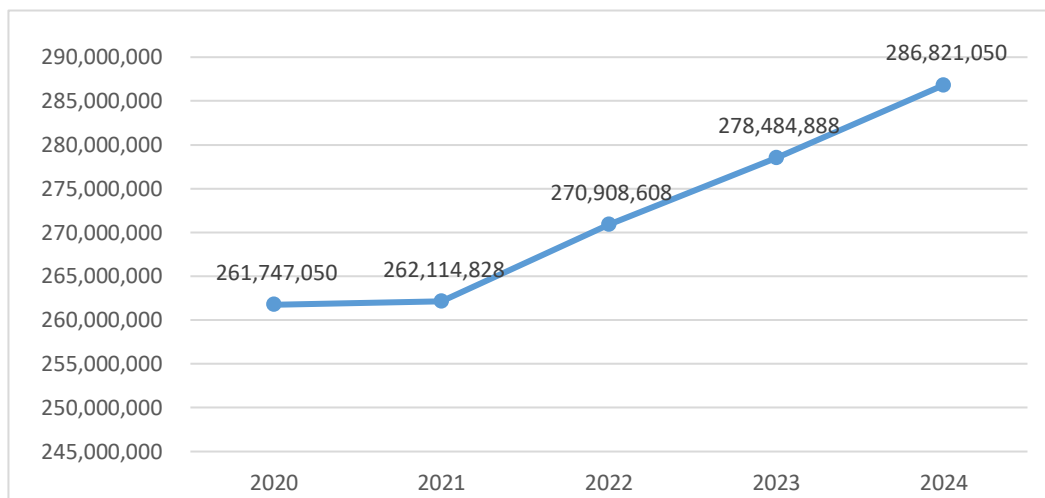
dan sosial. Dalam konteks tersebut, peran sumber daya manusia tidak dapat diabaikan. (Todaro, M. P., & Smith, 2006) dalam (Prayogo & Hasmarini, 2022)

Sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam kegiatan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia akan menentukan apakah dapat meningkatkan pembangunan atau tidak. Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari dua aspek yang pertama aspek fisik (kualitas fisik) dan yang kedua aspek non fisik (kualitas non fisik) menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan keterampilan keterampilan lain (Prayogo & Hasmarini, 2022)

Meskipun jumlah penduduk Indonesia relatif besar, kondisi tersebut tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja berpotensi menimbulkan pengangguran, pemborosan potensi ekonomi, serta peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi daerah (Prayogo & Hasmarini, 2022).

Secara teoretis, peran tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam teori klasik Adam Smith yang menekankan produktivitas tenaga kerja, serta model pertumbuhan Solow yang memasukkan tenaga kerja sebagai faktor input utama dalam proses produksi. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa di negara berkembang, tenaga kerja yang melimpah belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal akibat keterbatasan produktivitas, keterampilan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui

pendidikan, pelatihan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber: BPS (Data Diolah, 2024)

Grafik 1.4

Persentase Tenaga Kerja di Indonesia 2020-2024

Grafik 1.4 Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di wilayah Indonesia bagian barat pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, di mana satuannya diukur dalam jiwa yang merepresentasikan angkatan kerja yang aktif masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan fenomena bonus demografi yang masih berlangsung, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi. Menurut ILO (2020), pertumbuhan tenaga kerja yang stabil menjadi faktor penting dalam mendukung dinamika perekonomian suatu negara karena menyediakan pasokan sumber daya manusia untuk menggerakkan sektor-sektor produksi. Senada dengan itu, BPS (2021) mencatat bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja di

Indonesia terutama dipengaruhi oleh transisi demografi yang memperbesar proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif.

Jika dikaitkan dengan teori ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo menegaskan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang berkontribusi langsung pada penciptaan output. Semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, semakin besar pula potensi pertumbuhan output nasional, sepanjang tenaga kerja tersebut terserap secara optimal. Dalam perspektif teori Harrod-Domar, ketersediaan tenaga kerja yang memadai juga menjadi prasyarat agar investasi dapat menghasilkan output tambahan secara berkelanjutan, sebab modal tidak akan produktif tanpa adanya pekerja yang mengoperasikan teknologi dan menggerakkan mesin produksi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menjelaskan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efeknya bersifat menurun (*diminishing return*) apabila tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas, keterampilan, dan adopsi teknologi baru.

Temuan ini sejalan dengan analisis World Bank (2022) yang menekankan bahwa melimpahnya tenaga kerja dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya apabila diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di era digitalisasi dan globalisasi. Di sisi lain, Setiawan & Haryanto (2023) menemukan bahwa di Indonesia bagian barat, pertumbuhan tenaga kerja memang berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya berbeda antarprovinsi tergantung pada struktur ekonomi lokal, misalnya provinsi yang basis industrinya

kuat akan menyerap tenaga kerja lebih optimal dibandingkan provinsi yang masih didominasi sektor primer.

Fenomena kenaikan jumlah tenaga kerja yang terus berlanjut juga menciptakan tantangan tersendiri. Di satu sisi, ketersediaan tenaga kerja yang besar merupakan peluang emas bagi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan output. Namun di sisi lain, jika pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran terbuka maupun setengah menganggur. Di sinilah letak gap penelitian, yakni bagaimana memastikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja benar-benar berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat, mengingat hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi dampak antarwilayah dan sektor.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti tenaga kerja di tingkat nasional atau sektor tertentu, tanpa membahas distribusi agregat antarprovinsi di Indonesia bagian barat. Padahal, data BPS menunjukkan variasi signifikan, di mana provinsi berpenduduk besar seperti Sumatera Utara memiliki jumlah tenaga kerja jauh lebih tinggi dibanding provinsi kecil seperti Bengkulu atau Kepulauan Riau. Fenomena ketimpangan ini menandakan perbedaan peluang ekonomi dan kapasitas pertumbuhan antarwilayah, tetapi belum banyak dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian inilah yang hendak diisi dalam studi ini.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) terletak pada upaya menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja secara simultan

terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian Barat. Penelitian sebelumnya umumnya masih membahas ketiga variabel tersebut secara terpisah atau terbatas pada wilayah tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai peran ketiganya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru periode 2020–2024 yang merepresentasikan dinamika pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, termasuk pergeseran pola investasi dan realokasi kebijakan fiskal daerah.

Penelitian ini difokuskan pada provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian barat selama periode 2020–2024, dengan mempertimbangkan keragaman kapasitas fiskal, arus investasi, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengayaan teori pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam rangka mendorong konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 18 provinsi di Indonesia bagian barat?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada 18 provinsi di Indonesia bagian barat?

3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada 18 provinsi di Indonesia bagian barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia bagian barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia bagian barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Indonesia bagian barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, dengan menambah kajian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian Barat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terutama dalam mengoptimalkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan investasi, dan memberdayakan tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian Barat.